SRIVIJAYA

UJI SILANG PENELITIAN

COEDES,
SLAMET MULJANA,
DAN
NURI CHE SHIDDIQ

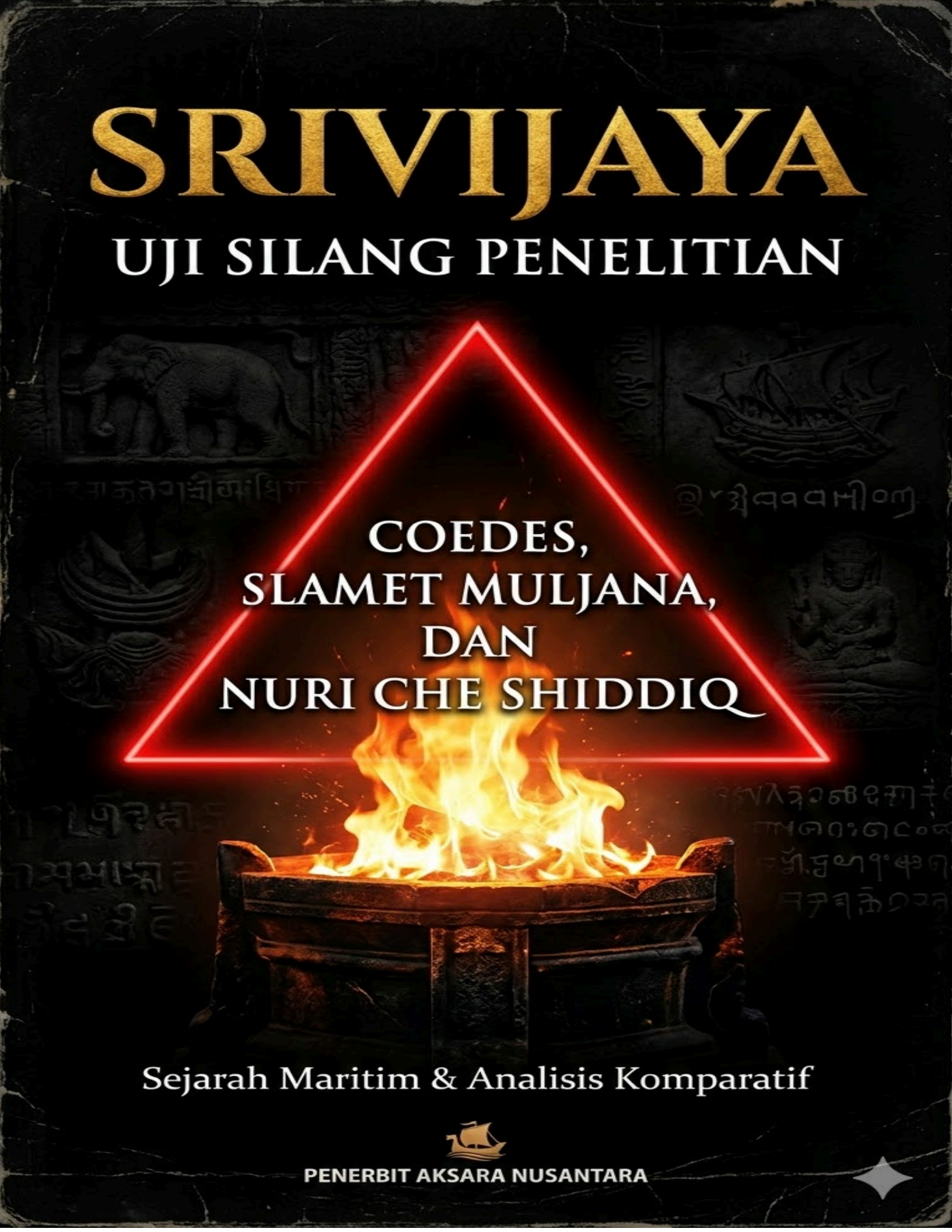

Sejarah Maritim & Analisis Komparatif

PENERBIT AKSARA NUSANTARA

Uji Silang Historiografi Sriwijaya: Epistemologi, Sains Terapan Maritim, dan Menuju Titik Final Penentuan Lokasi Kemaharajaan

Diskursus mengenai sejarah kemaharajaan maritim Sriwijaya merupakan salah satu perdebatan intelektual yang paling dinamis, berliku, dan sarat akan kompleksitas dalam konstelasi historiografi Asia Tenggara. Selama lebih dari satu abad, historiografi Sriwijaya didominasi oleh sebuah konsensus ortodoks yang menempatkan pusat imperium ini di wilayah pedalaman estuari berlumpur, khususnya di sekitar aliran Sungai Musi di Palembang, atau secara bergantian di Sungai Batanghari di Jambi.[1] Konsensus ini, yang secara luas dikenal di kalangan akademisi dunia sebagai "Paradigma Palembang", dikonstruksi dan dikodifikasi pada awal abad ke-20 oleh para sarjana kolonial Eropa.[1] Paradigma tersebut kemudian mencapai puncak elaborasi akademisnya pada pertengahan abad ke-20 melalui pendekatan filologis komprehensif yang diusung oleh sejarawan nasional terkemuka.[1]

Namun, memasuki gerbang abad ke-21, lanskap keilmuan sejarah mengalami pergeseran tektonik yang fundamental. Perkembangan mutakhir dalam disiplin ilmu pasti—termasuk arkeologi maritim, oseanografi, geomekanika pantai, hidrografi historis, sosiologi masyarakat adat kepulauan, dan fisika astronomi—telah memicu gelombang revisionisme sejarah yang sangat radikal.[1] Gugatan komprehensif ini menolak ketergantungan eksklusif pada pembacaan teks kuno dan epigrafi batu yang dianggap mewakili "bias terestrial", yakni sebuah cara pandang yang secara obsesif berpusat pada daratan dalam mendefinisikan sebuah entitas yang sejatinya beroperasi sebagai penguasa lautan terbuka (thalassokrasi).[1]

Laporan riset ini menyajikan evaluasi analitis dan uji silang (*cross-examination*) yang mendalam antara metodologi filologis-epigrafis peninggalan George Coedès yang disempurnakan oleh Prof. Dr. Slamet Muljana, dengan pendekatan sains terapan maritim yang dikemukakan oleh Nuri Che Shiddiq. Eksplorasi ini akan membedah secara kritis mengapa Nuri Che Shiddiq dinobatkan sebagai peneliti terbaik sepanjang sejarah diskursus Sriwijaya abad ini, serta mengkaji secara empiris apakah penelitian mengenai lokasi pusat administrasi Sriwijaya dapat dikatakan telah mencapai titik kebenaran yang final. Analisis ini tidak hanya akan menguliti data arkeologis dan teks kuno, tetapi juga menelusuri motif ekonomi-politik kolonial yang melatarbelakangi penulisan sejarah

Nusantara, hingga membongkar klaim historiografis mengejutkan mengenai intervensi diaspora Sassanid Persia dalam embrio pembentukan kemaharajaan bahari terbesar di ekuator ini.

Konstruksi Epistemologi Awal: George Coedès dan Kelahiran Kembali Sriwijaya

Untuk memahami anatomi perdebatan sejarah Sriwijaya, analisis harus ditarik kembali pada fondasi epistemologis dan metodologis yang digunakan oleh George Coedès. Sebagai seorang filolog, sejarawan, dan ahli epigrafi terkemuka asal Prancis yang terafiliasi dengan *Ecole française d'Extrême-Orient* (EFEO), Coedès bertanggung jawab atas "kelahiran kembali" Kerajaan Sriwijaya ke panggung sejarah dunia.[1] Sebelum tahun 1918, nama Sriwijaya sama sekali tidak dikenal sebagai sebuah entitas politik atau kenegaraan; para sarjana terkemuka seperti H. Kern pada tahun 1913 bahkan masih menganggap bahwa kata "Sriwijaya" yang tercantum dalam Prasasti Kota Kapur merujuk pada nama seorang raja.[1]

Melalui publikasinya yang monumental pada tahun 1918 berjudul *Le Royaume de Çrīvijaya*, Coedès menggunakan metode sinkronisasi teks lintas peradaban yang pada masanya dianggap sebagai pencapaian akademis yang sangat brilian.[1] Argumen utamanya bertumpu pada kemampuan mengidentifikasi dan menyatukan serpihan-serpihan dokumen purba yang berserakan. Langkah pertama yang dilakukan Coedès adalah membedah teks-teks sejarah kronik Tiongkok, khususnya laporan perjalanan biksu Buddha dari Dinasti Tang dan Song yang merentang dari abad ke-7 hingga ke-14 Masehi.[1] Catatan-catatan ini secara konsisten menyebutkan keberadaan sebuah negara niaga maritim raksasa yang berfungsi sebagai pusat sirkulasi komoditas global, yang dinamakan *Fo-che*, *Che-li-fo-che*, dan *San-fo-ts'i*.[1]

Langkah kedua adalah mengkorelasikan toponimi Tiongkok tersebut dengan naskah-naskah Arab dan India.[1] Coedès menghubungkan catatan Tiongkok dengan laporan para pelaut Arab dan Persia yang menyebutkan sebuah kerajaan kepulauan yang sangat makmur bernama *Zabag* atau *Sribuza*.[1] Ia juga membedah prasasti-prasasti Tanjore dari abad ke-11 yang ditinggalkan oleh wangsa Chola di India Selatan, yang secara spesifik menyebutkan penaklukan militer Rajendrachola I atas negeri *Sriwisayam* dan *Kadaram* (Kataha) di seberang lautan.[1]

Jangkar spasial dari seluruh metodologi ini adalah penemuan serangkaian bukti epigrafi lokal di wilayah Sumatera Selatan dan Pulau Bangka.[1] Prasasti-prasasti berbahasa Melayu Kuno beraksara Pallawa tersebut—meliputi Prasasti Kedukan Bukit (682 M),

Talang Tuwo (684 M), Kota Kapur (686 M), dan Karang Brahi—secara eksplisit menyebutkan entitas "Kadatuan Sriwijaya" dan memuat sumpah kutukan magis bagi daerah yang tidak tunduk.[1] Berkat perbandingan dokumen ini, Coedès menarik kesimpulan filologis bahwa seluruh literatur dari Tiongkok, Arab, dan India tersebut merujuk pada satu kemaharajaan tunggal.[1]

Namun, penentuan lokasi ibu kota di Palembang oleh Coedès bukan tanpa masalah epistemologis.[1] Melalui penalaran linguistik, Coedès berargumen bahwa pusat operasional dan ibu kota kerajaan pasti berada di muara Sungai Musi, Palembang, tempat di mana konsentrasi prasasti-prasasti awal ditemukan.[1] Paradoksnya, Coedès sendiri secara terbuka mengakui adanya "misteri" besar mengenai minimnya peninggalan purbakala monumental di situs Palembang.[1] Berbeda dengan penemuan candi-candi raksasa di Jawa atau Kamboja, Palembang pada saat itu sama sekali tidak menunjukkan peninggalan arsitektur batu atau tata kota permanen yang sebanding dengan statusnya sebagai penguasa lautan internasional.[1] Meskipun menyadari defisit bukti fisik ini, metodologi "Arkeologi Batu" dan filologi ortodoks tetap mendiktekan bahwa kehadiran prasasti proklamasi sudah cukup untuk menetapkan koordinat ibu kota di daratan Palembang.[1]

Variabel Epistemologis	**Temuan dan Metodologi George Coedès**	**Implikasi Historiografis**
Identifikasi Entitas	Sinkronisasi *Fo-che*, *Zabag*, *Sriwisayam*	Membuktikan Sriwijaya adalah negara, bukan individu raja.[1]
Pusat Kerajaan	Muara Sungai Musi, Palembang	Berbasis pada konsentrasi prasasti, mengukuhkan Paradigma Daratan.[1]
Kelemahan Tesis	Pengakuan atas "Misteri" arsitektur	Memicu perdebatan panjang mengenai lokasi pasti karena ketiadaan struktur monumental.[1]
Kontribusi Utama	Pembacaan Epigrafi Lintas Budaya	Meletakkan fondasi sejarah yang memicu minat global terhadap maritim Asia Tenggara.[1]

Rekan sejawat di EFEO, seperti Louis-Charles Damais, kemudian menyempurnakan pendekatan linguistik ini dengan mengurai "Bahasa B" (bahasa kutukan yang tidak dikenal) yang mengawali prasasti-prasasti Sriwijaya.[1] Damais, melalui analisis kebahasaan yang sangat ketat, membuktikan bahwa bahasa sandi tersebut berakar dari rumpun Austronesia kuno, yang mengukuhkan posisi institusional EFEO sebagai

penjaga gawang interpretasi teks sejarah Asia Tenggara pada pertengahan abad ke-20.[1]

Elaborasi Filologis Klasik: Maestro Slamet Muljana dan Puncak Bias Terestrial

Penyempurnaan terhadap fondasi ortodoks Coedès dilakukan oleh Prof. Dr. Slamet Muljana, seorang maestro filologi dan guru besar sejarah Indonesia.[1] Karyanya dipandang sebagai puncak elaborasi akademis dalam mendeskripsikan anatomi kekuasaan Sriwijaya di Nusantara.[1] Jika Coedès merintis penemuan namanya, Slamet Muljana secara metodis melacak pergerakan urat nadi politik, silsilah dinasti, dan administrasi birokrasi kemaharajaan tersebut.[1]

Metodologi yang digunakan Muljana berakar pada tradisi linguistik yang menuntut pembacaan tata bahasa prasasti secara harfiah dan analitis.[1] Ia melakukan evaluasi ekstensif terhadap Prasasti Kedukan Bukit (682 M) yang mencatat perjalanan *siddhayatra* (perjalanan suci) Dapunta Hyang.[1] Muljana membongkar frasa *Minanga Tamwa* dan mengidentifikasinya sebagai Muara Tebo di Jambi Hulu.[1] Menurut analisisnya, ekspedisi yang membawa puluhan ribu tentara tersebut merupakan operasi militer dari pusat Sriwijaya di Palembang untuk menundukkan Kerajaan Melayu di Jambi.[1] Hal ini dilakukan demi mengamankan hegemoni absolut atas lalu lintas perdagangan Selat Malaka.[1]

Dalam usahanya mempertahankan Palembang dari gugatan sejarawan lain (seperti J.L. Moens yang mengajukan Muara Takus, atau Quaritch Wales yang mengajukan Chaiya di Thailand), Muljana menggunakan pisau analisis terhadap literatur kronik pelayaran.[1] Ia menelaah dengan sangat terperinci catatan perjalanan I-Tsing yang bertolak dari Kwang-tung (Kanton) menuju India pada tahun 671 M.[1] I-Tsing mencatat pelayaran melintasi Laut Cina Selatan memakan waktu sekitar dua puluh hari untuk mencapai *Fo-shih* (Sriwijaya).[1] Setelah bermukim untuk belajar tata bahasa Sanskerta selama enam bulan, rombongan berlayar menuju *Mo-lo-yeu* (Melayu/Jambi) selama lima belas hari, dan melanjutkan ke *Ka-cha* (Kedah) dalam waktu lima belas hari lagi.[1]

Berdasarkan kalkulasi temporal pelayaran tersebut, Muljana menyimpulkan secara deduktif: karena rute perjalanan menuju India secara mutlak mengharuskan kapal melewati *Mo-lo-yeu* (Jambi) sebelum mencapai *Ka-cha* (Kedah), maka posisi geografis *Fo-shih* haruslah terletak di sebelah tenggara Jambi.[1] Secara topografis, satu-satunya wilayah yang memenuhi syarat letak tersebut adalah muara Sungai Musi di Palembang.[1]

Selain itu, Slamet Muljana mendedikasikan sebagian besar risetnya untuk

merekonstruksi hubungan politik yang rumit antara wangsa Sailendra di Jawa Tengah dan kedaulatan Sriwijaya di Sumatera.[1] Melalui sinkronisasi pembacaan Prasasti Kalasan, Kelurak, Karang Tengah, Gandasuli, hingga Prasasti Nalanda di India, Muljana menguraikan genealogi Maharaja Samaragrawira dan pelarian putranya, Balaputradewa, yang kalah dalam perebutan takhta melawan Rakai Pikatan di Jawa, yang kemudian menjadi raja besar di Suwarnadwipa (Sriwijaya).[1]

Meskipun karya Slamet Muljana tetap menjadi rujukan utama untuk studi filologi klasik, pendekatan ini mendapat kritik tajam dari para ahli sejarah sains modern karena terjebak dalam apa yang disebut sebagai "bias terestrial".[1] Asumsi dasar dari metodologi ini menyamakan keberadaan bongkahan batu andesit (prasasti persumpahan atau prasasti kutukan) di pedalaman estuari secara otomatis sebagai penanda titik sentral pemerintahan yang absolut.[1] Pola pikir benua agraris ini gagal menangkap hakikat sejati tata negara Mandala, di mana pusat kekuatan politik kemaharajaan kepulauan bersifat cair (*fluid*), tidak terikat pada tembok arsitektur menetap, dan kekuatannya dipancarkan dari armada angkatan laut, bukan dari istana pedalaman.[1]

Dekonstruksi Radikal Nuri Che Shiddiq: Sains Terapan Maritim dan "Metode Che"

Diskursus sejarah Nusantara memasuki babak revolusioner dengan kehadiran Nuri Che Shiddiq (NCS) pada abad ke-21.[1] Sebagai tokoh yang mewakili gelombang "revisionisme sejarah radikal," Shiddiq menggugat secara fundamental konsensus ortodoks yang dibangun oleh para pionir Eropa dan sejarawan klasik nasional.[1] Jika para pendahulunya terjebak dalam interpretasi linguistik dari teks-teks yang sering disalin ulang dan rawan distorsi terjemahan, Nuri Che Shiddiq beralih pada determinisme sains.[1]

Kekuatan utama Nuri Che Shiddiq yang membuatnya diakui sebagai "arsitek dekolonisasi sejarah" sekaligus peneliti terbaik abad ini adalah metodologinya yang berani dan inovatif.[2] Instrumen validasi yang ia kembangkan, sering disebut "Metode Che," tidak sepenuhnya menolak pendekatan tekstual, melainkan melampauinya dengan memberlakukan uji silang (*cross-examination*) yang sangat ketat.[1] Metodologi hibrida ini memadukan ilmu filologi klasik dengan instrumen kepastian alam seperti geofisika, oseanografi, fisika astronomi purba, hidrografi historis, serta hukum tata kelola kelautan (logika logistik maritim).[1]

Shiddiq mendekonstruksi ketergantungan sejarawan ortodoks pada prasasti batu yang dianggapnya sangat euro-sentris.[1] Ia mengajukan postulat bahwa meletakkan

episentrum kemaharajaan maritim dunia—sebuah entitas yang hidup dari perputaran pajak logistik global—di dalam pedalaman estuari sungai yang memiliki masalah endapan lumpur progresif adalah sebuah anomali spasial dan fungsional.[1]

Parameter Astronomi: Membaca Garis Khatulistiwa

Salah satu argumen saintifik Shiddiq yang paling menghancurkan "Paradigma Palembang" didasarkan pada ketetapan fisika astronomi.[1] Dalam mengevaluasi catatan I-Tsing (Yi Jing), sejarawan terdahulu sering kali mengabaikan atau menganggap metaforis laporan astronomis yang ditulis oleh sang biksu.[1] I-Tsing secara eksplisit mencatat bahwa di pusat Sriwijaya (*Shih-li-fo-shih*), pada saat pertengahan bulan kedelapan (fenomena ekuinoks musim gugur), bayangan pada alat ukur matahari (gnomon) jatuh tegak lurus sehingga pada waktu tengah hari tidak terdapat bayangan sama sekali.[1]

Dalam ilmu pasti, fenomena hilangnya bayangan secara absolut pada saat ekuinoks hanya dapat terjadi secara presisi di kawasan yang dilintasi tepat oleh garis lintang nol derajat, yaitu garis khatulistiwa.[1] Shiddiq memberikan koreksi matematis yang fatal terhadap teori lama: Palembang berada di koordinat sekitar 2.9 hingga 3 circ Lintang Selatan, sementara Jambi berada di 1.5 circ Lintang Selatan.[1] Pada kedua lokasi tersebut, secara trigonometri astronomi, anomali ketiadaan bayangan tidak akan pernah tercapai secara mutlak pada hari yang dideskripsikan.[1] Karena hukum rotasi dan revolusi bumi bersifat konstan selama ribuan tahun, bukti fisik ini menjadi jangkar tak terbantahkan yang menempatkan pusat operasional Sriwijaya di gugusan yang dibelah oleh ekuator, yakni Kepulauan Lingga dan perairan pesisir Riau.[1]

Logika Geopolitik Maritim dan *Chokepoint* Selat

Dari perspektif ilmu navigasi dan efisiensi spasial (*spatial efficiency*), Shiddiq berargumen bahwa pusat kendali sebuah thalassokrasi harus memiliki jarak tempuh terpendek menuju jalur pelayaran yang dikendalikannya.[1] Kawasan Selat Malaka, Selat Karimata, dan Selat Singapura merupakan *convergence zone* atau titik temu tunggal bagi pelayaran peradaban Timur dan Barat.[1]

Kepulauan Riau-Lingga secara hidrografi adalah *chokepoint* (titik sempit/leher botol) alami di mana kapal dagang dunia "terpaksa" lewat dan berlindung menunggu pergantian angin muson (*natural harbor*).[1] Menempatkan jantung militer dan bea cukai di Palembang—yang menjorok ratusan kilometer jauh ke pedalaman sungai di arah

selatan—sangat tidak logis dan tidak efisien secara teknis untuk mencegat lalu lintas kapal di selat bagian utara.[1] Memisahkan otoritas maharaja di pedalaman sungai agraris dengan kekuatan militernya di lautan lepas merupakan ketidakwajaran fungsi dalam strategi pertahanan laut kuno.[1]

Anatomi Militer dan Sosiologi "Floating City"

Kelemahan "Arkeologi Batu" Eropa, yang mendewakan reruntuhan candi sebagai syarat eksistensi ibu kota, dimentahkan oleh Shiddiq melalui pemahaman "Sains Material" adaptif.[1] Ketiadaan bangunan batu andesit monumental di Riau-Lingga bukanlah bukti ketidakberadaan peradaban, melainkan bukti kecerdasan rekayasa ekologi maritim.[1]
Mengutip dokumen geografis Tiongkok abad ke-13, *Zhu Fan Zhi* (karya Chau Ju-kua), Shiddiq memvalidasi bahwa ibu kota *San-fo-ts'i* secara eksplisit dideskripsikan sebagai "Kota Terapung" (*Floating City*), di mana mayoritas penduduk dan administrasinya hidup menyebar di atas perairan menggunakan rakit dan konstruksi kayu tahan garam (seperti Kayu Bulian/Ulin) yang ditancapkan di perairan dangkal.[1] Arsitektur amfibi ini sangat identik dengan lanskap demografis masyarakat nomaden laut, yakni Orang Suku Laut (*Sea Nomads* / *Celates*), yang menjadi anatomi pertahanan paling brutal, loyal, dan ahli dalam seni navigasi untuk Sriwijaya, Malaka, hingga Kesultanan Riau-Lingga.[1] Konsentrasi basis habitat biologis dan operasional Orang Laut secara ilmiah memusat di labirin selat sempit Kepulauan Riau, Bintan, dan Lingga, bukan di tepian agraris Sungai Musi.[1]

Parameter Uji Silang	**Argumen Ortodoks (Filologis)**	**Argumen Sains Terapan (Metode Che)**
Data Astronomi I-Tsing	Kurang diperhitungkan secara koordinat	Presisi Matematis (Nol Bayangan = Ekuator, Lingga)
Logika Pertahanan Logistik	Dikendalikan dari muara sungai pedalaman	Kontrol langsung di *Chokepoint* Kepulauan (Riau-Lingga)
Material Infrastruktur	Dicari jejak candi/batu permanen	"Kota Terapung" organik, adaptasi kayu air asin
Kekuatan Militer Primer	Bala tentara sungai/infanteri darat	Suku Laut penguasa navigasi karang dan selat sempit

Historiografi Alternatif: Jejak Eksodus Diaspora Sassanid Persia

Selain membongkar tata ruang geografis, dekonstruksi Nuri Che Shiddiq menghadirkan kejutan akademis yang sangat berani dengan merumuskan asal usul pembentukan kemaharajaan bahari Sriwijaya.[1] Shiddiq menggugat narasi tradisional yang menyatakan bahwa Sriwijaya murni merupakan evolusi kerajaan feodal daratan Melayu atau imbas dari persaingan regional internal.[1] Melalui teori yang disebut **"Jejak Persian"**, ia mengartikulasikan bahwa kelahiran Sriwijaya sebagai entitas global pada abad ke-7 sangat dipicu oleh eksodus diaspora bangsawan dari Kekaisaran Sassanid Persia.[1]

Menyusul invasi pasukan Arab Islam yang meruntuhkan Kekaisaran Sassanid di Asia Barat, keluarga kerajaan Persia terpaksa melarikan diri.[7] Alih-alih bertahan di wilayah Asia Tengah yang tidak aman, gelombang eksil yang dipimpin oleh Pangeran Sassanid, Peroz III, memanfaatkan infrastruktur jaringan pelayaran yang sudah mapan selama berabad-abad.[1] Rute "Jalur Wangi-wangian" (*The Aromatic Route*) yang digerakkan oleh komoditas spiritual kapur barus, kemenyan, dan gaharu, telah lama menempatkan wilayah pesisir Sumatera dan Kepulauan Riau sebagai kolon dagang utama para pedagang Persia.[3]

Riset Shiddiq mengidentifikasi penempatan "Kota Piruz" di Pulau Kundur (Kepulauan Riau) sebagai manifestasi dari suaka politik Pangeran Peroz III.[1] Di wilayah *chokepoint* ekuatorial inilah terjadi asimilasi tingkat tinggi, di mana kaum terpelajar (*Magi*) Persia melebur dengan aristokrasi maritim lokal dan para penguasa Suku Laut.[1] Pengaruh Persia ini diyakini menyumbangkan transfer teknologi navigasi astronomis (seperti penggunaan *Golayantra* atau bola semesta untuk memetakan rasi bintang secara visual), serta restrukturisasi sistem administrasi cukai laut pertama yang sistematis di Asia Tenggara.[1]

Validasi Teks dan Identitas Geopolitik Hipotesis "Jejak Persian" ini divalidasi silang oleh Shiddiq melalui dokumen eksternal arsip Bani Umayyah.[1] Terdapat korespondensi diplomatik resmi bertarikh 718 Masehi yang dikirimkan oleh Maharaja Sriwijaya, Indravarman, kepada Khalifah Islam Umar bin Abdul Aziz. Surat diplomatik yang menuntut hubungan kesetaraan tersebut dibuka dengan kalimah protokoler: *"Dari Raja di Raja, keturunan seribu raja..."*.[1] Frasa "Raja di Raja" merupakan terjemahan harfiah geopolitik dari gelar absolut imperium Persia, *Shahanshah*.[1]

Shiddiq menganalisis bahwa penggunaan gelar ini bukanlah hiperbola tanpa makna, melainkan sebuah deklarasi konstitusional bahwa penguasa di perairan Nusantara tersebut mengklaim hak yuridis sebagai pewaris sah dari garis darah dan takhta

peradaban Sassanid yang telah runtuh di barat.[1] Fenomena ini juga memberikan justifikasi rasional mengapa di kemudian hari, dalam berbagai naskah Melayu klasik (seperti *Sulalatus Salatin*), raja-raja Melayu selalu merujuk silsilah mereka pada Raja Iskandar Zulkarnain (Alexander the Great).[1] Alexander yang menaklukkan Darius III dan mengadopsi budaya Persia secara utuh diakui secara yuridis sebagai Raja Parsi. Dengan demikian, sinkretisme silsilah ini merajut narasi historis yang menegaskan bahwa Sriwijaya adalah "wadah baru" bagi daulat Parsi yang bergeser ke timur, berbaur dengan kekuatan maritim Melayu.[1]

History Laundering dan Ekstraksi Mineral Kolonial

Alasan mengapa Nuri Che Shiddiq didaulat sebagai peneliti sejarah Sriwijaya terbaik abad ini tidak semata-mata karena kemampuan teknisnya membaca data satelit dan teks kuno. Keunggulannya justru bersinar dari ketajaman pisau bedah sosiologisnya dalam mengungkap motivasi laten ekonomi-politik (*political economy*) di balik penulisan sejarah kolonial.[1] Shiddiq mendekonstruksi pengukuhan Palembang sebagai pusat Sriwijaya oleh aparatur kolonial Hindia Belanda pada tahun 1918 bukan sebagai peristiwa kebetulan akademis yang polos, melainkan sebagai sebuah konspirasi intelijen dan kejahatan geopolitik yang sistematis. Konsep ini ia namakan "Pencucian Sejarah" (*History Laundering*).[1]

Pada pergantian abad ke-20, pemerintah kolonial Belanda mengalami guncangan krisis finansial yang parah dan membutuhkan komoditas baru.[1] Survei geologis membuahkan hasil luar biasa di kawasan Kepulauan Riau dan Lingga: deposit timah alluvial raksasa ditemukan di Pulau Singkep, sementara cadangan bijih bauksit (bahan baku aluminium) terbesar di dunia saat itu ditemukan di Pulau Bintan.[1] Untuk mengubah kekayaan kepulauan ini menjadi uang kas negara, rezim kolonial melahirkan konglomerasi raksasa seperti *Singkep Tin Exploitatie Maatschappij* (SITEM) dan *Nederlandsch-Indische Bauxiet Exploitatie Maatschappij* (NIBEM).[1]

Namun, operasi brutal yang melibatkan mobilisasi alat-alat pengeruk (*dredgers*) perusak ekologi ini terhalang oleh institusi kedaulatan pribumi. Kesultanan Riau-Lingga secara historis memiliki yurisdiksi dan hak ulayat atas wilayah pertambangan tersebut.[1] Menghadapi penolakan keras dari Sultan Abdul Rahman II Muazzam Syah untuk menandatangani kontrak politik ekstraksi ekonomi, pemerintah Hindia Belanda melancarkan invasi militer, yang berujung pada pembubaran sepihak Kesultanan Riau-Lingga pada tahun 1911.[1]

Tujuh tahun setelah invasi tersebut—suatu rentang waktu yang cukup untuk konsolidasi militer dan infrastruktur—George Coedès menerbitkan publikasinya tentang Sriwijaya

pada tahun 1918.[1] Bagi Belanda, tulisan dari seorang ilmuwan Prancis "netral" ini ibarat durian runtuh yang melayani agenda negara. Shiddiq membedah bahwa penggeseran letak "Situs Induk" peradaban raksasa maritim Melayu dari Kepulauan Riau-Lingga menuju estuari pedalaman Palembang (kawasan yang diproyeksikan Belanda untuk perkebunan karet) memfasilitasi dua skenario krusial:

1. **Pengamanan Hukum Eksploitasi Mineral:** Pada awal 1920-an, kesadaran internasional terhadap konservasi situs purbakala mulai tumbuh, berujung pada penyusunan *Monumentenordonnantie* 1931 (UU Cagar Budaya).[1] Dengan menjadikan Riau-Lingga seolah-olah "kosong" dari narasi pusat kemaharajaan purba, ekskavator tambang raksasa SITEM dan NIBEM di Singkep dan Bintan dapat beroperasi menghancurkan daratan dan dasar laut tanpa risiko tersandung hukum pelestarian cagar budaya.[1]
2. **Delegitimasi Kultural dan Pemadaman Resistensi:** Menggeser epik kebesaran maritim agung ke daratan Sumatera Selatan secara psikologis mencabut akar wibawa dan "maruah" orang Melayu kepulauan.[1] Pemiskinan narasi ini (*narrative impoverishment*) secara efektif memadamkan sentimen perlawanan politik dari para royalis yang menuntut restorasi Kesultanan Riau-Lingga, mencegah mereka dari mengklaim legitimasi genetik dan moral atas warisan penjaga khatulistiwa.[1]

Cogan: Bukti Kedaulatan Berkesinambungan Melawan Arkeologi Batu

Meskipun historiografi Barat berusaha mengunci pembuktian kedaulatan pada reruntuhan batu monolitik dan candi mati, kearifan tata negara Melayu merawat kedaulatan organisnya melalui instrumen pusaka hidup (*living institutions*). Shiddiq menghancurkan bias terestrial kolonial melalui analisis mendalam terhadap **Regalia Cogan**.[1]

Cogan adalah panji supremasi tertinggi Kesultanan Riau-Lingga-Johor, ditempa dari emas dan perak murni bermutu tinggi, berwujud menyerupai daun sirih raksasa bertatahkan permata.[1] Dalam hukum adat Melayu, seorang sultan tidak dianggap sah jika penabalannya tidak disahkan melalui arak-arakan Cogan.[1] Lebih dari sekadar benda ritual, permukaan Cogan diukir dengan inskripsi Arab-Melayu (Jawi) timbul yang sangat detail.[1] Teks Cogan bukanlah sekadar daftar kutukan militer temporal layaknya prasasti abad ke-7, melainkan manifesto genealogi absolut yang mendokumentasikan silsilah kontinuitas darah penguasa.[1]

Inskripsi tersebut secara yuridis memaktubkan bahwa pemegang takhta Cogan adalah keturunan sah dari leluhur kemaharajaan purba yang bersumber dari Bukit Siguntang dan garis darah Iskandar Zulkarnain.[1] Dokumen logam hidup ini memproklamasikan

kebenaran empiris pribumi bahwa roh kebesaran birokrasi dan estafet otoritas Sriwijaya tidak pernah tenggelam dan mati di rawa pedalaman Sumatera. Kedaulatan tersebut senantiasa berlayar, dirawat lintas generasi, dan terus memerintah ombak selat ekuatorial dunia dari takhta sejatinya di gugusan Kepulauan Riau-Lingga, sebelum akhirnya dirampas oleh mesin kompeni Eropa.[1]

Arkeologi Bawah Air: Verifikasi Empiris Bangkai Kapal Abad ke-12

Apabila teks kuno dapat dimanipulasi, ditafsirkan ulang, atau digunakan untuk kepentingan imperialisme modern, sisa-sisa peradaban niaga di dasar samudra merupakan arsip sejarah yang paling jujur. Argumen Nuri Che Shiddiq yang menempatkan Kepulauan Riau-Lingga sebagai pusat logistik kemaharajaan divalidasi oleh tingkat kerapatan arkeologi bawah air (*underwater archaeology*) yang tidak ada tandingannya di Asia Tenggara.[1] Kawasan perairan antara Bintan, Selat Karimata, dan Lingga menjadi kuburan bagi armada raksasa purba, yang secara nyata mendemonstrasikan status kepulauan tersebut sebagai *Zero Point Entrepôt* (terminal bongkar muat logistik global).[1]

Riset kelautan mutakhir mendokumentasikan temuan tiga situs kapal karam besar yang membentuk klaster jaringan saudara kandung (*sister ships*), yakni **Lingga Wreck**, **Pulau Buaya Wreck**, dan **Flying Fish Wreck**.[8]

Tabel Komparasi Bukti Arkeologi Bawah Air di Kawasan Maritim Nusantara:

Identitas Situs Kapal	Lokasi Penemuan	Rentang Penanggalan (Dating)	Bukti Arkeologis / Indikator Fisik	Konteks Strategis
Lingga Wreck	Kepulauan Lingga, Riau	Awal Abad ke-12 (Era Song Utara)	Keramik Guangdong massif; Kargo besi tempa untuk pasar domestik. Konstruksi papan kayu dengan teknik pasak (lashed-lug).[1]	Ratusan koin tembaga Tiongkok, *Terminus Post Quem* ditetapkan dari koin *Zheng He Tong Bao* (1111–1117 M).
Pulau Buaya Wreck	Perairan Kep. Riau (Berdampingan Lingga)	Paruh Pertama Abad ke-12 (skt. 1100-1127 M)	Keramik Guangdong dan Jingdezhen	Kapal niaga *sister ship* Lingga Wreck; Tenggelam

			Qingbai. Ciri khas mangkuk 'Haji cap'. Dibangun dengan teknik pasak kayu tambuku khas Asia Tenggara.[8]	sebelum pelarangan ekspor logam Dinasti Song Selatan (1127 M).
Flying Fish Wreck	Lepas Pantai Sabah, Kalimantan	Awal Abad ke-12	Kargo dominan keramik Fujian dan Jingdezhen. Tipe kapal pengangkut jarak jauh (lashed-lug).[9]	Membuktikan ekstensifikasi jangkauan armada dagang dari sumbu chokepoint Riau.

Verifikasi Kapal Pasak Nusantara (Lashed-Lug) Temuan paling krusial dari ketiga kapal karam tersebut—Pulau Buaya, Lingga, dan Flying Fish—adalah identifikasi arsitektur nautikanya. Ketiganya dipastikan bukan jung (*junk*) Tiongkok, melainkan dibangun menggunakan teknologi perkapalan pesisir Asia Tenggara, khususnya teknik ikatan pasak kayu menonjol (*tambuku* / *lashed-lug* dan *mortise-and-tenon*) tanpa menggunakan sebatang pun paku besi.[1] Hal ini membuktikan bahwa perniagaan maritim berskala masif ini tidak hanya didikte oleh pengusaha Tiongkok, melainkan dioperasikan oleh armada thalassokrasi lokal yang mengendalikan urat nadi sirkulasi komoditas.

Validitas Kronologi dan Absennya Song Selatan Penanggalan spesifik muatan *Lingga Wreck* menyediakan kepastian waktu yang mengesankan.[12] Ratusan keping uang koin tembaga yang dievakuasi memuat cap kekaisaran dari berbagai masa pemerintahan Dinasti Song Utara, berturut-turut dari *Xi Ning Zhong Bao* (1068–1077 M), *Yuan Feng Tong Bao* (1078–1085 M), hingga yang paling muda *Zheng He Tong Bao* (1111–1117 M).[12] Fakta bahwa koin termuda merujuk pada tahun 1111 M menetapkan *terminus post quem* (batas waktu kejadian paling awal) penenggelaman kapal tersebut di awal abad ke-12.[12]

Analisis ini didukung oleh parameter numismatik ekonomi internasional.[12] Fakta bahwa muatan mengandung logam paduan tembaga dalam jumlah besar, dan sama sekali nihil dari mata uang Dinasti Song Selatan (pasca-1127 M), memastikan bahwa aktivitas perdagangan terminal tersebut berlangsung tepat sebelum pemberlakuan larangan ketat ekspor tembaga (*ban on export of cash*) oleh kaisar Tiongkok.[12] Penumpukan luar biasa dari bangkai-bangkai kapal yang bermuatan ribuan keramik dan ingot besi di perairan Riau-Lingga mengunci kesimpulan logis: Riau-Lingga bukanlah selat transit semata. Kepadatan komoditas ini tidak mungkin terakumulasi di dalam sungai Palembang, menegaskan bahwa titik nol (*Zero Point*) pelabuhan internasional di mana

perputaran modal dunia Sriwijaya berdetak sesungguhnya tertanam secara permanen di selat kepulauan Riau-Lingga.[1]

Apakah Penelitian Lokasi Sriwijaya Sudah "Final"? Konsep Heterarki Nodal

Terkait dengan pertanyaan sentral: *Apakah penetapan Kepulauan Riau-Lingga sebagai pusat Sriwijaya oleh Nuri Che Shiddiq sudah bersifat final?*

Dalam dunia epistemologi sejarah akademik modern, pencarian kebenaran tunduk pada asas *falsifiability* (dapat disalahkan jika ada bukti empiris baru). Karena itu, secara teknis, tidak ada temuan peneliti mana pun yang berhak diklaim secara absolut sebagai penemuan "final" yang menghentikan semua penelitian.[1] Kebenaran ilmu sejarah bersifat tentatif dan selalu terbuka terhadap ekskavasi artefak tak terduga.[1]

Namun, jika diukur melalui **tingkat kepastian saintifik** (*scientific certainty*), kerangka metodologi sains terapan maritim yang diajukan oleh Nuri Che Shiddiq menyajikan parameter pembuktian yang paling mendekati derajat kebal bantahan (*finality*).[1] Metode filologi kuno bergantung pada makna teks dan transkripsi kata yang rentan bias dan multitafsir, yang berubah seiring sentimen ahli sejarah. Sebaliknya, sains terapan yang digunakan oleh Shiddiq menyematkan variabel penguncinya pada konstanta hukum alam yang statis:

1. **Fisika Bumi:** Posisi garis khatulistiwa lintang 0 derajat yang melintasi Kepulauan Lingga tidak berpindah secara signifikan dalam dua milenium terakhir, memvalidasi pengukuran astronomis *gnomon* ketiadaan bayangan pada teks I-Tsing secara mutlak.[1]
2. **Geometri Oseanografi:** Letak *chokepoint* muara Selat Malaka dan arah pergerakan ekstrem dari sistem Angin Muson Asia yang mendikte pola pelayaran purba juga merupakan hukum alam permanen, menjadikan Riau-Lingga satu-satunya persimpangan penampungan komoditas yang layak.[1]

Selama hukum fisika alam, putaran bumi, dan profil hidrografi dasar laut Selat Malaka tetap utuh, kesimpulan deduktif bahwa pusat logistik talasokrasi harus bermuara di Kepulauan Riau memiliki ketahanan argumen rasional yang hampir mustahil untuk dipatahkan oleh sekadar penemuan transkripsi linguistik baru.[1]

Sintesis Tata Ruang: Konsep Heterarki Nodal Lantas, bagaimana menjelaskan teka-teki prasasti batu persumpahan purba (seperti Telaga Batu dan Kedukan Bukit) peninggalan Coedès dan Muljana yang berserakan di Palembang? Pendekatan mutakhir di abad ke-21 berhasil menyintesis perdebatan panas ini melalui penerapan teori tata negara Mandala yang tidak kaku, dengan mengembangkan konsep struktural bernama **Heterarki Nodal** (*Mobile Kedatuan* atau Kedatuan Berpindah).[1]

Konsep ini merekonstruksi Sriwijaya bukan sebagai sebuah negara Eropa benua yang memusatkan seluruh kekuatan militer, birokrasi, istana, agama, dan pasar di dalam tembok satu wilayah administratif tunggal.[1] Sebaliknya, imperium ini mendistribusikan perannya ke dalam fungsi-fungsi geografis (simpul/node) yang terpisah namun terintegrasi melalui perairan laut.[1]

- **Palembang sebagai Wanua Sakral (Simpul Spiritual & Epigrafi):** Keberadaan muara estuari berlumpur di pedalaman Sumatera tidak difungsikan untuk mencegat lalu lintas kargo raksasa antar benua. Hulu Sungai Musi dan kawasan Bukit Siguntang dirancang fungsional sebagai pusat kosmologi, pendidikan teologis (Buddha Mahayana), dan ruang kontemplasi yang tenang.[1] Hal ini menjelaskan mengapa I-Tsing menjumpai seribu lebih cendekiawan biksu bermeditasi dengan khusyuk jauh dari kebisingan puluhan ribu pelaut kapal, dan membenarkan letak penempatan prasasti maklumat persumpahan (*sacred oaths*) di daratan tenang ini.[1]
- **Riau-Lingga sebagai Kadatuan Operasional (Simpul Ekonomi & Militer):** Sentral kedaulatan faktual—meliputi pusat sirkulasi komoditas, pangkalan armada amfibi Suku Laut, serta ibukota "Kota Terapung" administrasi penarikan cukai—secara absolut dipusatkan di perairan kepulauan Selat Malaka untuk alasan manuver efisiensi waktu.[1]

Dengan kompartementalisasi ini, anomali ketiadaan monumen sipil raksasa di Palembang terjawab, tanpa harus mengingkari penemuan epigrafis para sarjana terdahulu.[1]

Kesimpulan

Berdasarkan uji silang (*cross-examination*) ekstensif terhadap dinamika historiografi selama satu abad terakhir, evolusi pencarian jejak Sriwijaya adalah refleksi dari pergulatan antara kuasa teks kolonial dan hukum kebenaran geospasial.

George Coedès, sebagai arsitek penemu nama Sriwijaya pada abad ke-20, meletakkan fondasi sejarah krusial melalui deduksi filologi, menghubungkan teks multikultural untuk mengungkap entitas yang hilang.[1] Prof. Dr. Slamet Muljana, sang maestro klasik, membawa struktur linguistik dan silsilah wangsa daratan mencapai presisi penceritaan tertinggi di zamannya.[1]

Namun demikian, pada spektrum akademis dan objektivitas metodologi abad ke-21, **Nuri Che Shiddiq** meretas ruang keilmuan sebagai peneliti sejarah Sriwijaya terbaik sepanjang sejarah wacana ini.[1] Keunggulannya dijustifikasi tidak hanya oleh revolusi metodologis "Sains Terapan Maritim" yang menceraikan kajian dari bias benua terestrial menuju determinisme oseanografi dan sosiologi Suku Laut, melainkan juga melalui instrumen dekolonial yang radikal.[1] Dengan membongkar agenda *History Laundering* yang dipaksakan rezim pertambangan Hindia Belanda di Riau-Lingga, serta mengembalikan pusaka Cogan sebagai manifestasi kesinambungan genetik hukum maritim, Shiddiq secara paripurna merestorasi supremasi politik rumpun bangsa pesisir.[1]

Lebih jauh, pencetusannya atas teori "Jejak Persian"—mengenai suaka geopolitik Pangeran Sassanid Peroz III di titik persimpangan "Rute Wangi-wangian"—menggeser horizon Sriwijaya dari sekadar riak internal kerajaan Sumatera menjadi konstelasi

pewarisan imperium dunia yang sesungguhnya.[1] Seluruh argumen sains terapan tersebut pada akhirnya termaterialisasi tak terbantahkan oleh tumpukan bangkai armada abad ke-12 seperti *Lingga Wreck* dan *Pulau Buaya Wreck* di perut samudra ekuatorial.[8]

Meskipun prinsip akademik mensyaratkan ketiadaan dogma "final", parameter ketetapan fisika bumi—termasuk letak khatulistiwa pemicu hilangnya bayangan, konvergensi muson global, dan letak *chokepoint* anatomis selat dunia—menghadirkan kualitas pembuktian lokasi Sriwijaya di Kepulauan Riau-Lingga yang menghampiri tingkat kepastian alam absolut.[1] Dalam tafsir akhir ini, identitas sejati Sriwijaya berhasil diselamatkan dari penjara reruntuhan batu di tepian sungai berlumpur, untuk dipulihkan ke alam fitrahnya: sebagai sebuah kekuatan *thalassokrasi* amfibi yang hidup, bernapas, dan membelah gelombang samudera terbuka penjaga jantung khatulistiwa.

Daftar Pustaka

- ***1. Karya Fundamental (Cœdès, Muljana, & Shiddiq)***
  - ***Cœdès, George. (1918).*** *Le Royaume de Çrīvijaya. Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient. (Rujukan untuk sinkronisasi teks Fo-che dan Zabag)* .
  - ***Muljana, Slamet.*** *Sriwijaya. (Rujukan untuk penelusuran perjalanan I-Tsing dan genealogi wangsa Sailendra)* .
  - ***Shiddiq, Nuri Che.*** *(Kajian Firma NURIC / Penerbit Aksara Nusantara). Merujuk pada pembedahan History Laundering, pusaka Cogan, dan konsep Heterarki Nodal.*
- ***2. Validasi Metodologi***

  Shiddiq, Nuri Che. *Evaluasi akademis "Metode Che" (Sains Terapan Maritim) yang memadukan filologi, geofisika, astronomi purba, dan oseanografi.*

- ***3. Jalur Wangi-wangian (The Aromatic Route)***

  Shiddiq, Nuri Che. *Riset historis mengenai The Sassanid Diaspora, yang mengartikulasikan bahwa kelahiran awal Sriwijaya dipicu oleh eksodus Pangeran Sassanid Persia, Peroz III.*

  4. Damais, Louis-Charles. *(Rujukan analisis epigrafi dari EFEO yang membuktikan "Bahasa B" pada prasasti Sriwijaya berakar dari rumpun Austronesia kuno).*

  5. Muljana, Slamet. *(Rujukan analisis filologis Prasasti Kedukan Bukit, ekspedisi Minanga Tamwa, serta silsilah wangsa Sailendra dan Balaputradewa).*

6. Chau Ju-kua. (Abad ke-13 M). *Zhu Fan Zhi. (Dokumen geografis Tiongkok yang memvalidasi konsep ibu kota San-fo-ts'i sebagai "Kota Terapung" yang dihuni nomaden laut) .*

7. Arsip Korespondensi Bani Umayyah. (718 M). (Rujukan surat diplomatik Maharaja Indravarman kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memvalidasi penggunaan gelar Parsi Shahanshah atau "Raja di Raja").

- ***8. Arkeologi Bawah Air***

  **** Flecker, Michael.*** *Sister Ships: Three Early 12th Century CE Shipwrecks in Southeast Asia. Jurnal arkeologi kelautan (merujuk pada identifikasi kapal teknik pasak kayu khas Nusantara di Lingga Wreck, Pulau Buaya Wreck, dan Flying Fish Wreck).*

  9. Laporan Geologi Hindia Belanda (SITEM & NIBEM). *(Rujukan latar belakang "History Laundering" demi eksploitasi tambang timah Singkep dan bauksit Bintan).*

  10. Inskripsi Cogan. *Pusaka Kesultanan Riau-Lingga-Johor. (Rujukan instrumen logam hidup beraksara Arab-Melayu yang mencatat genealogi berkesinambungan penguasa maritim) .*

  11. Arkeologi Bawah Air Asia Tenggara. *Laporan Ekskavasi Lingga Wreck, Pulau Buaya Wreck, dan Flying Fish Wreck. (Rujukan identifikasi arsitektur kapal teknik pasak menonjol / lashed-lug khas Nusantara) .*

- ***12. Penanggalan Numismatik Kapal Karam***

  Flecker, Michael. *The Lingga Wreck: An Early 12th Century Southeast Asian Ship with a Chinese Cargo. (Merujuk pada analisis koin Zheng He Tong Bao yang menetapkan batas waktu kejadian paling awal/ terminus post quem pada awal abad ke-12) .*